

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan anggaran sendiri. Desa secara merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa.

Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah dengan tujuan digunakan secara luas dan nyata dimana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pemberian otonom daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi (Nogi, 2005). Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan wewenang untuk menghasilkan keputusan keputusan politik tanpa intervensi pusat kepada pemerintah daerah mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokratis (Mahmud, 2002). Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah

untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggung jawaban).

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas mengacu pada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani oleh kewajiban untuk melaporkan sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberian tanggung jawab (Renyowijoyo, 2013). Akuntabilitas sangat diperlukan dalam sektor pemerintah dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain peran perangkat desa. Hal ini berdasarkan penelitian dari (Novindra, 2017) yang melakukan penelitian di Desa se-kecamatan Mungkid Kabupaten manggelang dalam penelitiannya disebutkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri alokasi dana desa untuk kepentingan sepihak.

Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. Indrajaya (2017) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Lebih lanjut, Kalbers dan Forgaty (2012) menambahkan selain adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi publik.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya, (Sugianto, 2005).

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian internal dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Pengamatan peneliti di lapangan khususnya di pemerintah Desa tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah. Hal ini didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF 2010) yang menyebutkan potensi- potensi penyalahgunaan dana Desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa dan sistem

pengendalian internal. Diarespati (2017) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/Kota diserahkan pada pemerintah desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan dan 241 desa. Kecamatan Rambang Kuang merupakan bagian dari kabupaten Ogan Ilir yang memiliki 13 desa. Salah satu desa yang termasuk di kecamatan Rambang Kuang yaitu Desa Sunur, Rincian dana desa yang diterima kecamatan Rambang Kuang tahun 2018 yaitu Rp 5.297.768.000 Dan desa Sunur menerima Alokasi Dana Desa Rp 407.136.000 penerimaan alokasi dana desa diiringi dengan pertanggung jawaban yang lebih tinggi atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar pengelolaan dana tersebut dapat diterima publik. Dengan demikian penelitian melakukan penelitian di desa Sunur dengan fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa diperlukan pengawasan yang ketat baik secara oprasional dan pengawasan teknis agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola alokasi dana desa. Pada saat ini yang terdapat temuan mengenai kendala lapangan, lalu juga kendala yang dikeluhkan oleh tim mengenai pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Desa Sunur , berdasarkan pengamatan peneliti pengetahuan masyarakat terutama pemerintah Desa tersebut masih minim dalam mengelola dana keuangan desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana

Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut, dan pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah tindak kecurangan atau rawan manipulasi yang terjadi atas laporan keuangan di publikasikan kepada publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar, Dan sistem pengendalian internal. yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik sehingga menimbulkan opini masyarakat pada kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut seperti adanya tindak korupsi oleh perangkat desa. Berdasarkan permasalahan diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang ”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang ?

2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang ?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti berkaitan pada pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran Perangkat desa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sunur kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kompetensi aparat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sunur kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sistem Pengendalian Internal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sunur kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis pada desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan peneliti jika dimintai pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun program pemerintah yang lebih akuntabilitas, transparan, dan lebih baik lagi bagi masyarakat.

c. Bagi pihak Akademisi

Sebagai acuan atau masukan bagi akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dan kerangka pemikiran, terdiri dari telaah tiori, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran,

serta teori-teori yang berhubungan dengan sistem informasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan prinsip pengelolaan penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, Lokasi Penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan meliputi deskripsi wilayah penelitian, metode penelitian, oprasional variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

